



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

Siaran Pers

**Periode : Januari 2011
Edisi : 12 Januari 2012**

JSMP Mendapatkan Kesempatan untuk Bertemu dengan Wakil Perdana Menteri di Kantornya

Pada tanggal 12 Januari 2012, Judicial System Monitoring Program (JSMP) mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri, Yang Mulia, Bapak José Luis Guterres di tempat kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan JSMP terdiri dari 7 orang dan dari pihak Kantor Wakil Perdana Menteri, selain Wakil Perdana Menteri, dihadiri juga oleh Penasehat Wakil Perdana Menteri.

Dalam surat permohonan JSMP, sebenarnya menurut rencana JSMP ingin bertemu dengan Yang Mulia, Perdana Menteri, Bapak José Alexandre Xanana Gusmão, namun karena Yang Mulia Perdana Menteri telah memiliki agenda penting lain, oleh karenanya beliau mendelegasikan kepada Wakilnya untuk bertemu dengan JSMP. Walaupun JSMP tidak bertemu secara langsung dengan Perdana Menteri, namun JSMP tetap merasa senang karena diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Wakil Perdana Menteri walaupun beliau sangat sibuk, beliau tetap berkenan untuk menerima dan mendengarkan pendapat JSMP mengenai peranan JSMP di Sektor Peradilan dan hambatan yang dihadapi oleh sektor peradilan selama ini.

Seperti pertemuan lain yang telah dilakukan oleh JSMP dengan otoritas lain pada tahun-tahun sebelumnya, pertemuan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan peranan JSMP di sektor peradilan dan mengajak semua pihak untuk bekerja secara kolektif untuk mendukung sektor peradilan. Selain itu, JSMP mengambil kesempatan untuk menjelaskan posisi JSMP yang selama ini cenderung mengambil sikap oposif/bersebrangan dengan kebijakan legislatif dan kebijakan peradilan yang menurut JSMP tidak mencerminkan kenyataan di Timor Leste dan kewajiban Timor Leste untuk menjamin keadilan bagi masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi dalam kerangka sistem hukum yang berlaku. Persoalan-persoalan yang dikedepankan JSMP termasuk kemandirian pengadilan, pemisahan kekuasaan, kejahatan masa lalu, perihal mengenai sumber daya manusia di pengadilan, bahasa yang digunakan di sektor peradilan dan para penerjemah di pengadilan, serta proses pembuatan undang-undang dan persoalan-persoalan praktis lainnya yang berkaitan dengan jalannya pengadilan. Secara khusus dalam kesempatan itu, JSMP mengajak dan mendorong otoritas yang berkompeten untuk menjauhkan diri dari praktek yang mencoba untuk mengurangi kemandirian dan kredibilitas pengadilan. Misalnya kasus Maternus Bere, pada tahun 2009.

Segala upaya yang dilakukan oleh JSMP tersebut, hanya dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengadilan menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan, konstitusi dan undang-undang serta praktek-praktek yang lazim yang telah diadopsi di negara Timor Leste.

Direktur JSMP, Luis de Oliveira Sampaio mengatakan bahwa pemerintah memiliki komitmen dan kemauan politik yang kuat untuk memberantas korupsi, namun ketika sistem hukum sebagaimana mestinya, maka komitmen dan kemauan politik tidak akan dapat terwujud. Karena menurut JSMP bahwa hanya melalui sektor peradilan yang kuat, maka kita dapat menjamin bahwa individu atau orang yang melanggar kewajibannya dan mencoba untuk memperkaya diri dan kelompok dapat menerima tanggungjawab sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum.

Pada sisi lain, setelah mendengar penjelasan dari JSMP, Bapak Wakil Perdana Menteri mengatakan bahwa pemerintah sangat membuka diri terhadap semua kritikan dan pemerintah memiliki komitmen kuat mengenai bagaimana untuk menciptakan demokrasi dan kebebasan berekspresi di negara ini. Pemerintah memahami dengan baik peranan masyarakat madani untuk melakukan kontrol sosial agar semuanya berjalan sesuai dengan hukum.

Menurut Bapak Wakil Perdana Menteri bahwa 'kritik adalah emas', karena itu ia mendorong JSMP untuk melanjutkan peranannya yang selama ini dilakukan untuk terus menantang/mengoreksi kebijakan dan tindakan pemerintah yang diperkenalkan kepada masyarakat untuk dapat merefleksikan kepentingan publik.

Lebih lanjut, Bapak Wakil Perdana Menteri mengatakan bahwa masyarakat madani memiliki peranan penting untuk menyambungkan suara/aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat ke pemerintah. Kritikan tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat madani, namun juga terjadi di Parlemen Nasional seperti partai politik melakukan kritikan tajam terhadap kebijakan pemerintah, namun pemerintah tetap menghargai dan mendengar secara cermat semua kritikan tersebut, karena pemerintah ingin menanamkan dan melestarikan demokrasi dan kebebasan berpendapat di negara kita ini. Oleh karena itu, dalam pesannya yang terakhir, beliau menghimbau kepada JSMP bahwa JSMP harus melanjutkan peranan penting ini, agar dapat menjamin sistem demokrasi dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di negara kita ini.

Sebelum mengakhiri pertemuan tersebut, JSMP menyampaikan rasa terima kasih atas segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, terlebih segala upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat sistem hukum ini, walaupun JSMP mengakui bahwa masih banyak hal yang harus diberi perhatian khusus untuk mendirikan sebuah sistem hukum yang kredibel untuk memastikan keadilan bagi semua orang.

Selain itu, pada kesempatan tersebut JSMP juga menyerahkan publikasi JSMP berupa laporan tematik atas kasus 11 Februari 2008 yang berjudul: *Lebih Banyak Pertanyaan dari pada Jawaban (Implikasi terhadap sistem peradilan di Timor Leste)* dan siaran pers mengenai: *'Jalan Panjang Menuju Sektor Peradilan di Timor Leste' Perkembangan dan tantangan terhadap sistem peradilan di Timor Leste selama 2011* "

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Telpon: 3323883/7295795